

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" Jensen dan Meckling (1976). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Perbedaan "*kepentingan ekonomis*" ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asymmetri (Kesenjangan informasi) antara Pemegang Saham (*Shareholders*) dan organisasi. Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi.

Terdapat tiga masalah utama dalam hubungan agensi, yaitu :

1. Kontrol pemegang saham kepada manajer
2. Biaya yang menyertai hubungan agensi
3. Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi

Hubungan agensi ini memotivasi setiap individu untuk memperoleh sasaran yang harmonis, dan menjaga kepentingan masing-masing antara agen dan principal. Hubungan keagenan ini merupakan hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan dan kepentingan

masing-masing pihak yang secara eksplisit dan sadar memasukkan beberapa penekanan seperti:

1. Kebutuhan principal akan memberikan kepercayaan kepada manajer dengan imbalan atau kompensasi keuangan.
2. Budaya organisasi yang berlaku dalam perusahaan.
3. Faktor luar seperti karakteristik industri, pesaing, praktek kompensasi, pasar tenaga kerja, manajerial dan isu-isu legal.

Strategi yang dijalankan perusahaan dalam memenangkan kompetisi global. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis.
2. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka.
3. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

## **B. Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan**

Dalam penyusunan Laporan keuangan, integritas laporan keuangan merupakan hal yang utama. Pengertian integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Dengan integritas laporan keuangan yang tinggi, pemakai laporan dapat mengandalkan informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Financial Accounting Standards Boards (FASB, 1992) dalam Nurin (2003) menyebutkan bahwa focus pemakai laporan keuangan adalah laba dan komponennya.

Pengertian laba menurut struktur akuntansi saat ini adalah laba merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual. didalam laporan keuangan, laba dipandang sebagai elemen yang penting dalam kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Manfaat laba tidak hanya karena laba berisi hasil operasi perusahaan tetapi juga pada metode penyusunan laba yang didasarkan pada metode akrual yang memberikan nilai tambah bagi laba tersebut.

Parawiyati (1996) dalam Siallagan dan Machfoeds (2006) menyatakan bahwa laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan. Baik kreditur maupun investor, menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, dan untuk memprediksi laba yang akan datang.

Bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal harga saham yang ditransaksikan dibursa merupakan indicator nilai perusahaan.

Apakah yang dimaksud dengan kualitas laba (earning quality)?.. Kualitas laba merupakan bagaimana proses suatu perusahaan dapat menentukan pemasukan keuangannya

dalam menjalankan usaha yang dijalankan demi mendapatkan keuntungan dalam perusahaan. Kualitas laba juga dapat memberikan respon kepada pasar, dengan kata lain laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (power of response). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas (Midiastuty dan Machmoedz, 2003).

Beberapa Faktor yang mempengaruhi kualitas laba diantaranya adalah sebagai berikut ini.

1. Persistensi Laba

Persistensi laba merupakan cermin kualitas laba yang diperoleh perusahaan karena perusahaan dapat mempertahankan perolehan laba tersebut dari waktu ke waktu dan bukan hanya karena suatu peristiwa tertentu.

2. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan tumbuh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi kesempatan perusahaan mendapatkan dan menambah laba yang diperoleh perusahaan pada masa mendatang

3. Besaran Perusahaan

Sebenarnya merupakan salah satu pengaruh untuk mengetahui kualitas laba yang dihasilkan. perusahaan besar dianggap memiliki informasi yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil.

Dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) disebutkan bahwa Chan et al (2001) menguji apakah return saham yang akan datang akan merefleksikan informasi mengenai kualitas laba saat ini. Kualitas laba diukur dengan akrual. Chan et al menemukan bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah, demikian juga sebaliknya.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di yang terdaftar di BEJ 2004-2007 menyimpulkan bahwa kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kualitas laba diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* sedangkan nilai perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:  
H1: Kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan

### **C. Mekanisme Corporate Governance**

Menurut teori keagenan *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau mekanisme dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Menurut Cadbury dalam Sutedi (2011).

*Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Kelompok negara maju *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Adapun *Center for European Policy*

*Study* (CEPS) memformulasikan *Good Corporate Governance* adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, dan pengendalian baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara dewan komisaris, Direksi, Pemegang saham dan Para Stakeholder lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan wewenang atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

Secara umum ada empat prinsip utama yaitu: *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* (Sutedi, 2011).

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

2. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. *Fairness* (Kewajaran)

Menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Prinsip-prinsip di atas perlu diterjemahkan ke dalam tiga aspek yang dijabarkan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institutional, dan regulatory untuk corporate governance di suatu negara. Tiga aspek tersebut antara adalah:

1. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan: Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
2. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham: Seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing harus diperlakukan setara. Seluruh pemegang saham harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
3. Peran *stakeholders* dalam *corporate governance*: Hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholders* harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

- Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

### **1. Kepemilikan Manajerial, Kualitas Laba, dan Nilai Perusahaan**

Kualitas Laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik (Jansen dan Meckling, 1976).

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (*outsider ownweship*), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri. Pendapat ini didukung di dukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri (2005). Dalam penelitian

Wahyudi dan Pawestri menyatakan kepemilikan manajerial secara langsung dan atau melalui keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Morcket al (1988) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai Perusahaan (Tobin's Q) pada level antara 0%-5%, dan berhubungan negatif pada level 5%-25%. Mereka menyatakan bahwa hipotesis pemutusan kepentingan akan terus terjadi ketika level kepemilikan manajerial lebih kecil dari 5% dan lebih besar dari 25%. Pada saat level kepemilikan manajerial lebih besar antara 5%-25% hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan dijelaskan melalui *entrenchment hypothesis*. Pada level kepemilikan manajerial antara 5%-25% manfaat privat yang diperoleh manajer (agen) melebihi kos yang dikeluarkan akibat kerugian dari keputusan-keputusan yang tidak memaksimalkan nilai perusahaan.

Bediono (2005) menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba dengan menggunakan analisis jalur. Salah satu mekanisme corporate governance yang digunakan adalah kepemilikan manajerial. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kepemilikan manajerial memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan tindakan manajemen laba.

Siallagan dan Machfoedz (2006) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accrual* dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa kepemilikan manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba dan secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2a: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba

H2b: kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan

## 2. Kepemilikan Institusional, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Sylvia dan Sidharta, 2005). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Menurut Lee et al., (1992) dalam Widiatmaja (2010) menyebutkan dua perbedaan pendapat mengenai investor institusional.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektifitas pengelola sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba.

Slovin dan Suskha (1993) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Machfoedz dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai perusahaan (Tobin's Q) dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional, ukuran dewan direksi.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan ERC yang merupakan proksi dari kualitas laba. *Earning Response Coefficient* (ERC) menyatakan bahwa pengaruh kepemilikan

institusional terhadap kualitas laba adalah positif meskipun pengaruhnya lemah. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin berkualitas. Tingginya kepemilikan saham dapat memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan laba mempunyai kekuatan responsive yang dapat memberikan reaksi positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan pelaku pasar modal lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3a: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kualitas laba

H3b: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan

### **3. Komisaris Independen, Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan**

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Manfaat *corporate governance* akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek *good corporate governance* mereka.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Vafeas (2000) dalam Siallagan dan Machfoed (2006) mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peranan komisaris independen juga

diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris.

Penelitian Besley (1996) dalam Siallagan dan Machfoed (2006) menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris dari luar lebih dapat untuk mengurangi kecurangan pelaporan keuangan daripada kehadiran komite audit. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dewan dan karakteristik komisaris yang berasal dari luar perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Chtourou et al (2001) menginvestigasi apakah praktek tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki pengaruh kepada kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka menemukan bahwa *earnings management* secara signifikan berhubungan dengan beberapa praktik *governance* oleh komisaris independen dan komite audit. Untuk komite audit, *income increasing earning management* secara negatif berasosiasi dengan proporsi anggota (member) yang besar dari luar yang bukan merupakan manajer pada perusahaan lain. Untuk komisaris independen, *income increasing earning management* yang rendah pada perusahaan yang memiliki *outside board members* yang berpengalaman sebagai *board members* pada perusahaan dan pada perusahaan yang lain.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q, menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap kualitas laba, sedangkan pengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H4a: Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba

H4b: Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan

#### 4. Komite Audit, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain adalah sebagai berikut ini.

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik, melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan.
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Pada umumnya, menurut FCGI (Forum Corporate Governance in Indonesia) komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang:

1) Laporan Keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal mengenai kondisi keuangan.

2) Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

### 3) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Hasil penelitian Dhaliwal, Naiker dan Navissi (2006) menemukan hubungan yang positif antara komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dengan kualitas akrual. Sedangkan penelitian oleh Suryana (2005) menunjukkan bahwa koefisien respon laba yang membentuk komite audit secara statistik lebih besar dari pada perusahaan yang tidak membentuk komite audit.

felo *et al* (2003) meneliti karakteristik komite audit terhadap kualitas laporan keuangan menyebutkan bahwa persentase anggota komite audit yang mempunyai pengalaman dibidang akuntansi atau manajemen keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan ukuran komite audit juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan manufaktur menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin's Q. Hal ini membuktikan bahwa komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan.

Dari uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5a: Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba

H5b: Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

#### D. Kerangka Pemikiran

Beberapa acuan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini mendasari tersusunnya kerangka pemikiran di bawah ini.

